

BAB IV

TEMUAN HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL WAWANCARA

Sebagai tahap awal menganalisis data hasil dari terjun ke Lapangan atau hasil dari Penelitian, maka peneliti mencoba untuk memberikan data awal berupa profil singkat informan sebagai pengantar Analisa kita tentang Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Bidang Kuliner di Kecamatan Gubeng.

Kedua informan ini adalah Bapak H. Supriono dan Bapak Imam Budi, beliau berbicara bagaimana awal mula PKL dibuatkan tempat yang Namanya menjadi Sentra Wisata Kuliner.

Bp. H. Supriono (Ketua PKL) : Kita berdiri tahun 2007 waktu itu pemerintah kota tidak mengundang sentra nya, kita ini berdiri beberapa tahun sebelum ada sentra, harapan kita kan bagaimana mengelola tempat tersebut menjadi ramai, semua tempat berkewajiban untuk meramaikan tempat tersebut bagaimana caranya, semisal lomba ikan hias, Latihan karate, ya alhamdulillah ada semacam sirkulasi pengunjung. Saya pernah cerita juga disini yang punya kemampuan main gitar begitu enak, kemudian tempat tempat yang lain kayak di kampus, contoh lain di sentra PKL Siwalankerto, Ketika Pandemi Lockdown langsung sepi tidak ada yang jualan tidak seperti dharmahusada,

bahkan sesama pinggir jalan, bratang, dan lainnya, coba di Bratang tidak ada musiknya pasti sepi. Itu yg menurut saya paling rame, karena apa orientasi pengunjung ya pelanggan karna datang ya lungguh makan sewajarnya sambil dengar music, kalau tempat saya ya fokusnya ke makan diberi musik ya tambah sepi. Seperti bungkul makanya saya bilang jangan dikaitkan jumlah kepala dengan jumlah pendapatan. Keberadaan sentra kuliner itu kan memang kebijakan pemerintah kota dalam rangka untuk melakukan penataan PKL terkait dengan keberadaan di pinggir jalan, di Surabaya ini sekitar ada 50 sentra yg dibangun, perkiraan seluruh Surabaya mulai dari barat, babat jerawat, lidah wetan, lidah kulon itu semua memanfaatkan lahan kosong milik pemkot, untuk sosialisasi kami diundang kebanyakan di balai rw atau kecamatan untuk relokasi, yg sering terjadi di awal adalah tentangan ketika punya usaha sendiri bisa tenda 3x4 meter tetapi ketika di sentra itu kan di lahan yg lebih kecil, Cuma masalahnya temen temen berfikiran awal selalu pesimis, apakah dari tempat asal pindah ke sentra itu laku atau tidak. Namun tidak begitu secara steril dari mereka yang nyaris tidak pernah dibangun tenda bawah yang selama ini di Surabaya karena memang nggak diterima. Nggak prospek sekali, Makanya dulu kita pernah waktu jadi konsultan itu pernah kita sampaikan bahwa mereka kontak dengan koperasi lewat semacam tanya kesempurnaan itu kita sampaikan ke pimpinan bahwa sebetulnya yang mau kita, yang mau kita kedepankan itu aturan dulu atau meramaikan dulu. Kalau kita ngomong aturan secara ketat dan aturan resikonya nggak bisa, lanjutnya. Karena

banyak kasus sentra itu rame. Dulu pernah saya sama temen temen kantor, kecamatan dan koperasi kita punya rencana adakan karaoke. Tujuan kita bukan meramaikan, tapi mengadakan pengunjung. Artinya, ketika kita hadirkan, pengunjung akan punya semacam tantangan untuk melayani sebaik mungkin agar dapat pengunjung yang datang pada saat event karaoke ini ditutup akhirnya. Jadi tidak hanya pengunjung, mereka jadi pelanggan. Itu makanya ada tahapan tahapan yang penting agar itu kalau kita mau meramaikan, catat juga karena ada lomba sampe bawa suporter rame rame. Tapi ketika bercakap cakap memberikan layanan terbaik, ya mereka menjadi pelanggan. Pelanggan hanya pengunjung waktu itu saja. Sangat susah, selain levelnya tinggi, yang itu tantangan sekali. Ini sebetulnya lebih kepada pemerintah apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menganggap dijamin sekarang itu lebih mudah dekat dengan apa ya kalau boleh ngomong itu karena pemerintah itu berani berpikir secara otomatis. Jadi berpikir di luar kelaziman. Kalau tidak diperlukan sebelumnya, akan gak ada lahan kosong dimanfaatkan untuk sesuatu yang mereka tidak dapat penghasilan. Kalau berfikir bisa dijalankan seolah olah ada penghasilan, trus apa beberapa tempat yang sewakan akan baik? Jadi kalau kita mau hidup itu ya sama itu ya retribusi yang diberikan oleh pedagang di sentra kuliner. Pernah juga ada survei acak iklan muncul pada salah satu kecamatan dari ini sekarang mendirikan koperasi. Dan apa sih yang kita berikan pada kita? Kemudian kita jadikan andalan itu brandingnya akhirnya koperasi, sehingga untuk sementara makan di tempat lain. Masyarakat Kota Surabaya

berharap dengan dibangunnya Sentra adalah lahan untuk mencari rejeki dan memudahkan mencari kuliner di lingkungan terdekat yang mereka tinggali.

Bp. Imam Budi (kasi penanganan PKL & Gakin) : Sebenarnya kebijakan Pemkot dalam mengelola Sentra adalah tugas Bersama dari berbagai instansi, seperti kecamatan dan kelurahan pun ikut andil dalam hal tersebut dikarenakan kelurahan yang mendata mana saja warga yang layak mendapat stan di Sentra tersebut, lalu tugas Kecamatan adalah verifikasi apa yang sudah di approve oleh kelurahan, apalagi saat ini kebijakan terbaru adalah Sentra dikhususkan bagi warga yang masuk di daftar Padat Karya atau Gamis (Keluarga Miskin). Hal ini yang menyebabkan muncul persepsi dari beberapa segi, misalnya Dari sisi biaya? Kalau pada kenyataannya dari pemerintah kota dalam arti tidak hanya kata, tetapi bisa juga bisa juga dana bagi hasil bisa cepat dan dana dari jasa. Tetapi jika saya bilang pemerintah juga memberinya sangat nanggung, hanya diberi stan saja yang free Kerjasama dengan dinas koperasi, tetapi untuk pengisian bahan pokok nya mereka tetap memakai modal sendiri. Dan beberapa Sentra produk yang mereka jual mayoritas adalah sama, tidak ada yang signifikan berbeda yang punya produk sendiri dan bisa di branding untuk menjadi keunggulan dalam satu titik lokasi Sentra tersebut. Jika semua Sentra mempunyai brand yang diunggulkan pasti warga juga tidak akan bosan untuk datang mengunjungi Sentra. Yang menjadi permasalahan disini karena telah ketika mungkin barulah setiap tahun yang dengan standarisasi upah itu yang pasti berubah naik naik. Artinya kan terhadap standarisasi yang baru itu pun itu karena kita juga bisa bisa berubah gitu.

Artinya mungkin yang lalu dengan standarisasi 4 juta mungkin sekarang sudah di level hampir 5 juta. Ketika mungkin yang padat karya sudah masuk dalam level nasional mendekati 4 juta, yang seharusnya target itu sudah sudah masuk pada output yang akhirnya masih level 4 juta. Apakah nanti akan tetap di biayai karena levelnya sudah lewat. Selain itu yang memiliki stan harus pintar pintar melihat segmentasi pasar mereka, apa yang membuat mereka laku, bagaimana caranya, dan usaha apa yang dilakukan, jika sudah ada segmen tersebut instansi terkait juga harus ikut andil misal dalam promosi brand agar sentra di titik tersebut bisa jadi contoh untuk sentra di titik lokasi yang lain.

A. PEMBAHASAN MASALAH

Dari beberapa Pertanyaan yang diajukan dalam tahapan untuk mengetahui bagaimana respon dari para responden diantaranya sebagai berikut :

1. Tentang : Apa saja langkah-langkah konkret yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung implementasi Perda?

Adanya Pelatihan Anggota PKL, dimana Pemerintah menyelenggarakan Program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Dan focus pada peningkatan manajerial, sanitasi, dan aspek kebersihan.

Dalam bantuan keuangan pemerintah pemberian bantuan keuangan kepada pedagang untuk membantu mereka memperbarui atau meningkatkan stand

dagang. Serta tujuan adalah mendorong peningkatan kualitas dan daya saing pedagang.

Dalam segi infrastruktur dan fasilitas, investasi dalam perbaikan infrastruktur dan fasilitas di sekitar Sentral PKL, termasuk peningkatan aksesibilitas dan keamanan. Dan dalam pembangunan tempat parkir dan area istirahat untuk mendukung aktivitas pedagang.

Pemantauan dan penegakan: Penyediaan tim pemantau untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan PERDA. Serta tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan untuk menciptakan lingkungan yang teratur.

Untuk sosialisasi PERDA: Dapat melakukan kampanye sosialisasi secara rutin ke pedagang dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pemahaman terhadap PERDA. Dan menggunakan media cetak, online, dan acara komunitas untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Sebagai konsultasi dengan stakeholder: melibatkan pedagang, masyarakat, dan kelompok terkait dalam proses konsultasi untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dan menciptakan forum dialog yang terbuka untuk mengakomodasi masukan dan umpan balik.

2. Terkait Dukungan Pemerintah dan DPRD. Sejauh mana Walikota dan DPRD Surabaya mendukung implementasi Perda ini?

Adanya Komitmen Walikota Surabaya secara aktif mendukung implementasi PERDA dengan menyuarakan pentingnya pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pertemuan public dan konferensi serta melakukan kunjungan langsung ke Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan untuk memastikan pemahaman langsung terhadap tantangan yang dihadapi.

Hadirnya Partisipasi DPRD Surabaya yaitu Anggota DPRD Surabaya terlibat dalam pembahasan dan perumusan kebijakan terkait PERDA dan mereka mengadakan rapat kerja dan konsultasi dengan pihak terkait untuk memastikan kesepahaman dalam mendukung langkah – langkah implementasi.

Dalam alokasi anggaran, DPRD berperan dalam alokasi anggaran untuk mendukung program pemberdayaan PKL sesuai dengan PERDA. Dimana pemerintah daerah dan DPRD bersama – sama mengamati ketersediaan sumber daya untuk memastikan implementasi yang efektif.

Adanya pengawasan dan evaluasi DPRD Surabaya secara aktif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap implementasi PERDA, termasuk melibatkan komisi terkait. Mereka melakukan evaluasi berkala terhadap capaian dan kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Adanya respons terhadap tantangan yaitu Pemerintah dan DPRD merespon cepat terhadap tantangan yang dihadapi, seperti penyesuaian aturan atau perubahan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi.

Dengan demikian, kerjasama yang erat antara Walikota Surabaya dan DPRD menjadi kunci dalam mendukung dan memastikan keberhasilan implementasi PERDA mengenai pemberdayaan pedagang kaki lima.

3. *Terkait Dukungan Pemerintah dan DPRD. Bagaimana peran DPRD dalam proses pembahasan dan penetapan Perda tersebut?*

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memiliki peran krusial dalam proses pembahasan dan penetapan Perda (Peraturan Daerah). Berikut adalah beberapa tahapan dan peran DPRD dalam proses tersebut: Perihal Inisiasi Rancangan Perda, DPRD dapat menginisiasi pembahasan Perda sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dan Anggota

DPRD dapat mengusulkan rancangan Perda atau merespons tuntutan masyarakat terkait isu tertentu.

Pembahasan Rancangan Perda dimana DPRD membentuk panitia khusus atau komisi yang bertanggung jawab untuk membahas rancangan Perda. Anggota DPRD melakukan diskusi, konsultasi, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, ahli, dan masyarakat.

Mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mendengarkan pandangan masyarakat dan pihak terkait terhadap rancangan Perda dan Proses ini membuka ruang partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan.

Adanya Perubahan dan Penyesuaian, DPRD memiliki wewenang untuk melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap rancangan Perda sesuai dengan

hasil pembahasan dan masukan yang diterima. Dan Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang dapat diakomodasi oleh semua pihak terkait.

Dalam Pengambilan Keputusan. Mereka melakukan pemungutan suara atau pengambilan keputusan terkait persetujuan terhadap rancangan Perda. Dan Mayoritas suara dari anggota DPRD diperlukan untuk menetapkan Perda.

Dalam Penetapan Perda tersebut. Setelah melewati seluruh tahapan pembahasan, DPRD menetapkan Perda sebagai undang-undang tingkat daerah. Dan Penetapan ini menandai kesepakatan resmi untuk mengimplementasikan aturan yang tertuang dalam Perda.

Dengan demikian, DPRD memiliki peran penting dalam membentuk, membahas, dan menetapkan Perda, sehingga menggambarkan kebijakan hukum daerah yang berlaku.

4. Partisipasi Pedagang Kaki Lima. Sejauh mana pedagang kaki lima terlibat dalam proses implementasi dan bagaimana persepsi mereka terhadap kebijakan pemberdayaan?

Partisipasi dalam Perumusan Kebijakan. Sejauh mana pedagang kaki lima terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat inklusivitas pemerintah daerah. Dan PKL yang aktif berpartisipasi dapat memberikan masukan langsung melalui forum konsultasi dan rapat terbuka.

Proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Konsultasi sering memberikan platform bagi pedagang untuk menyuarakan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Persepsi mereka terhadap kebijakan dapat tercermin dari masukan yang disampaikan selama proses ini.

Mengadakan Sosialisasi Kebijakan dimana Pedagang yang terlibat dalam kebijakan mungkin mendapatkan informasi melalui kampanye sosialisasi pemerintah. Persepsi mereka terhadap kebijakan bisa dipengaruhi oleh pemahaman yang diberikan dalam tahap ini.

Keberlanjutan Pelatihan dan Dukungan, Jika pemerintah menyediakan pelatihan dan dukungan, pedagang yang aktif berpartisipasi dapat mengambil manfaat lebih besar dari program tersebut. Persepsi positif dapat muncul jika pelatihan dianggap relevan dan bermanfaat.

Respons terhadap Dukungan Finansial dari pemerintah mungkin memiliki persepsi positif terhadap upaya pemberdayaan. Keterlibatan langsung mereka dalam program ini dapat menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan.

Evaluasi dan Umpan Balik, Proses evaluasi yang melibatkan pedagang untuk memberikan umpan balik tentang dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Persepsi mereka dapat tercermin dalam evaluasi ini, baik itu kesuksesan atau tantangan yang dihadapi.

Dengan memahami partisipasi pedagang kaki lima dalam setiap tahap implementasi dan mendengarkan persepsi mereka, pemerintah dapat

mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kebijakan pemberdayaan mencapai hasil yang diharapkan.

5. Partisipasi Pedagang Kaki Lima. Apakah ada mekanisme partisipasi atau konsultasi pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan terkait implementasi Perda?

Mekanisme partisipasi atau konsultasi pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan terkait implementasi Perda dapat mencakup langkah-langkah Forum Konsultasi Rutin, dimana Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan forum konsultasi reguler dengan perwakilan pedagang kaki lima untuk mendiskusikan isu-isu terkait kebijakan dan implementasi Perda serta Forum ini memberikan ruang bagi pedagang untuk menyampaikan masukan dan memahami lebih lanjut proses kebijakan.

Penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara berkala untuk memungkinkan pedagang kaki lima memberikan masukan langsung terkait pengalaman mereka, hambatan yang dihadapi, dan saran perbaikan serta Proses ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Adanya Penyuluhan dan Sosialisasi yang Melibatkan PKL dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait Perda, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan tujuan pemberdayaan dan Pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan masukan dan tanggapan langsung.

Pembentukan Kelompok Kerja Bersama bersama yang terdiri dari perwakilan pedagang kaki lima, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Dimana Kelompok ini dapat berkumpul secara berkala untuk membahas implementasi, mengevaluasi program, dan mencari solusi atas masalah yang muncul.

Membangun platform digital atau aplikasi khusus untuk mendukung komunikasi antara pemerintah dan PKL serta Forum online dapat digunakan untuk menyampaikan ide, masukan, dan mendapatkan tanggapan secara real-time.

Melakukan survei periodik atau fokus group diskusi untuk memahami pandangan lebih dalam dari sejumlah pedagang kaki lima. Dimana Data dari survei ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mekanisme ini diharapkan dapat menciptakan proses partisipatif yang lebih efektif, memperkuat hubungan antara pemerintah dan pedagang kaki lima, serta meningkatkan peluang keberhasilan implementasi Perda pemberdayaan pedagang kaki lima.

6. Perubahan dalam Kondisi Usaha. Apakah implementasi Perda memiliki dampak langsung pada kondisi usaha pedagang kaki lima, seperti peningkatan pendapatan atau akses ke fasilitas pendukung?

Implementasi Perda dapat memiliki dampak langsung pada kondisi usaha pedagang kaki lima. Berikut beberapa potensi dampak positif yang dapat terjadi

Peningkatan Pendapatan dimana Program pemberdayaan yang diatur oleh Perda dapat memberikan peluang bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan keterampilan mereka, menjangkau pelanggan lebih luas, atau mendapatkan dukungan finansial dan Langkah-langkah ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pedagang.

Adanya Akses ke Fasilitas Pendukung, Jika Perda mencakup pembangunan atau perbaikan infrastruktur di sekitar area pedagang kaki lima, seperti peningkatan aksesibilitas, pembangunan tempat parkir, atau area istirahat, maka pedagang dapat mengalami peningkatan kenyamanan dan fasilitas pendukung yang mendukung usaha mereka.

Jika program pemberdayaan mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan, pedagang kaki lima dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka. Dan peningkatan keterampilan ini dapat berdampak positif pada daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Dengan adanya regulasi yang jelas melalui Perda, pedagang kaki lima dapat merasa lebih aman secara hukum serta Keamanan hukum ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, memberikan keyakinan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha mereka tanpa takut akan tindakan hukum yang merugikan.

Namun, perlu diingat bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada efektivitas implementasi Perda, tingkat partisipasi pedagang, dan dukungan

pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memahami sejauh mana implementasi Perda memberikan dampak positif pada kondisi usaha pedagang kaki lima.

7. Perubahan dalam Kondisi Usaha. Bagaimana respon pedagang kaki lima terhadap perubahan-perubahan tersebut?

Respon pedagang kaki lima terhadap perubahan yang mungkin terjadi akibat implementasi Perda dapat bervariasi. Berikut beberapa kemungkinan respon yang dapat terjadi. Jika perubahan menciptakan peluang baru, seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau akses ke fasilitas pendukung, pedagang kaki lima dapat merespons dengan positif dan peningkatan pendapatan atau kondisi usaha yang lebih baik dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi.

Pedagang kaki lima mungkin menghadapi tantangan atau ketidakpastian awal terkait perubahan kebijakan atau aturan baru serta respon awal mungkin mencakup kehati-hatian dan upaya untuk memahami dampaknya terhadap usaha mereka.

Jika program pemberdayaan ditawarkan, sebagian pedagang mungkin aktif berpartisipasi dan mengambil manfaat dari pelatihan atau dukungan finansial. Respon positif ini dapat tercermin dalam peningkatan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan.

Jika perubahan dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang, mereka mungkin menunjukkan ketidakpuasan atau bahkan resistensi

terhadap implementasi Perda. Dan hal ini dapat terjadi jika regulasi dianggap memberatkan atau tidak memperhatikan kondisi nyata pedagang.

Beberapa pedagang yang adaptif dapat merespon perubahan dengan berinovasi dalam strategi pemasaran, produk, atau cara operasional mereka. Dan inovasi ini mungkin muncul sebagai upaya untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang berubah.

Penting untuk terus menggali pandangan dan pengalaman pedagang kaki lima melalui survei, fokus group diskusi, atau dialog terbuka. Dengan memahami respon mereka, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan dan program pemberdayaan untuk mencapai dampak positif yang lebih besar.

8. *Terkait Perizinan dan Regulasi. Bagaimana proses perizinan usaha bagi pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?*

Proses perizinan usaha bagi pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan akan bergantung pada regulasi yang diatur oleh Perda Surabaya No. 17 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaannya. Berikut adalah tahapan umum proses perizinan tersebut PKL perlu mendaftarkan usaha mereka di pemerintahan daerah setempat, kemungkinan melalui kantor Dinas Perdagangan atau instansi terkait. Dan pendaftaran ini dapat melibatkan pengumpulan dokumen seperti identitas pedagang, informasi tentang jenis usaha, dan lokasi yang diinginkan.

Pihak terkait, mungkin termasuk petugas dari Dinas Perdagangan atau instansi terkait, akan melakukan verifikasi dan penilaian lokasi usaha yang diajukan. Dan penilaian ini dapat mencakup pertimbangan terkait ketertiban umum, aksesibilitas, dan keamanan.

Setelah pendaftaran dan verifikasi, pedagang kaki lima kemungkinan diharuskan mengajukan dokumen perizinan tertentu, seperti izin usaha atau surat izin berdagang sesuai dokumen ini akan dinilai untuk memastikan sesuai dengan persyaratan Perda yang berlaku.

Pedagang kaki lima mungkin harus membayar retribusi atau biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut. dan pembayaran ini biasanya berfungsi sebagai kontribusi terhadap pemeliharaan fasilitas dan layanan pendukung.

Dan Jika semua persyaratan terpenuhi, izin usaha atau perizinan resmi akan diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin ini dapat mencakup ketentuan terkait waktu dan lokasi operasional pedagang kaki lima.

Pemerintah daerah dapat melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

Evaluasi periodik juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kondisi usaha pedagang.

Proses ini dapat bervariasi tergantung pada ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah dan perubahan dalam regulasi setempat. Pemerintah biasanya

berupaya untuk memastikan bahwa proses perizinan dapat dilakukan dengan efisien dan adil, sejalan dengan tujuan pemberdayaan pedagang kaki lima.

9. Perizinan dan Regulasi. Apakah ada perubahan dalam regulasi yang memengaruhi keberlanjutan usaha pedagang kaki lima?

Informasi spesifik mengenai perubahan dalam regulasi terkait keberlanjutan usaha pedagang kaki lima di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan tidak tersedia dalam konteks pengetahuan saya hingga batas waktu pemotongan informasi pada Januari 2022.

Perubahan regulasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dapat melibatkan berbagai aspek, seperti aturan lokasi, jam operasional, persyaratan keamanan, atau biaya perizinan. Jika terdapat perubahan dalam regulasi setempat, pedagang kaki lima mungkin harus menyesuaikan operasional mereka sesuai dengan ketentuan baru. Sarana terbaik untuk memperoleh informasi terkini tentang perubahan regulasi adalah dengan menghubungi instansi pemerintah setempat yang berwenang, seperti Dinas Perdagangan atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Mereka biasanya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan yang ada dan perubahan terbaru yang mungkin memengaruhi pedagang kaki lima di wilayah tertentu.

10. Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan. Apakah program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pedagang kaki lima?

Evaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti desain program, partisipasi pedagang, dan dukungan pemerintah.

Program yang sukses sering kali menawarkan materi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari pedagang kaki lima. Dan Pelatihan yang fokus pada peningkatan keterampilan manajerial, pemasaran, atau manajemen keuangan dapat membawa manfaat nyata.

Tingkat partisipasi pedagang dalam program pendidikan dan pelatihan memainkan peran kunci dalam keberhasilan. Dan program yang menarik dan mengakomodasi kebutuhan praktis pedagang dapat mendorong partisipasi aktif.

Program yang menyediakan dukungan setelah pelatihan, seperti mentoring atau konsultasi lanjutan, dapat membantu menerapkan keterampilan yang diperoleh dalam konteks nyata.

Proses evaluasi yang berkelanjutan dapat membantu pemerintah memahami sejauh mana program mencapai tujuannya. Umpan balik langsung dari pedagang kaki lima dapat memberikan wawasan berharga untuk peningkatan program di masa mendatang.

Program yang didukung dengan sumber daya memadai, seperti fasilitator berkualitas dan materi pelatihan yang baik, memiliki peluang lebih besar untuk sukses.

Kerjasama dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah, dapat memperkaya program dengan keahlian tambahan.

Pengukuran dampak jangka panjang, seperti peningkatan pendapatan atau perubahan positif dalam kondisi usaha, dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang keberhasilan program.

Sementara beberapa program dapat terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pedagang kaki lima, evaluasi yang cermat dan pemantauan terus-menerus penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata mereka.

11. Dalam hal Pendidikan dan Pelatihan. Sejauh mana pedagang kaki lima mengakses dan mengambil manfaat dari program tersebut?

Sejauh mana pedagang kaki lima mengakses dan mengambil manfaat dari program pendidikan dan pelatihan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain Ketersediaan Informasi dimana PKL dapat mengakses program lebih baik jika mereka memiliki informasi yang jelas tentang ketersediaan dan manfaatnya serta

komunikasi efektif dan promosi program dapat memastikan pedagang mengetahui peluang pendidikan dan pelatihan yang tersedia.

Program yang dirancang dengan fleksibilitas, seperti jadwal pelatihan yang dapat diakses, dapat meningkatkan partisipasi pedagang. Program yang dapat disesuaikan dengan jadwal kerja pedagang kaki lima yang mungkin tidak stabil bisa lebih efektif.

Pedagang cenderung lebih tertarik dan berpartisipasi aktif jika materi pelatihan relevan dengan kebutuhan dan tantangan usaha mereka. Program yang menyediakan solusi praktis dan langsung dapat menarik minat lebih banyak pedagang.

Dukungan dari pihak penyelenggara program, baik sebelum, selama, maupun setelah pelatihan, dapat memotivasi pedagang untuk mengambil manfaat maksimal. Pemahaman tentang keuntungan jangka panjang dari program juga dapat meningkatkan partisipasi.

Upaya untuk membuat program inklusif, dengan memperhatikan berbagai tingkat pendidikan dan kemampuan, dapat meningkatkan aksesibilitas bagi pedagang dengan latar belakang yang beragam.

Perlunya dukungan finansial dan program memerlukan biaya, tingkat partisipasi dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan finansial, seperti beasiswa atau bantuan biaya.

Upaya penyuluhan dan kampanye sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima terhadap keberadaan program pendidikan dan pelatihan serta keterlibatan komunitas dalam proses sosialisasi juga dapat memotivasi partisipasi.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan respons langsung dari peserta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi dan manfaat yang diambil oleh pedagang kaki lima.

12. Perihal Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Bagaimana implementasi Perda berkontribusi pada kesejahteraan pedagang kaki lima, baik dari segi ekonomi maupun sosial?

Implementasi Perda (Peraturan Daerah) yang berfokus pada pemberdayaan pedagang kaki lima dapat memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Berikut adalah beberapa cara implementasi Perda dapat berkontribusi:

Aspek Ekonomi:

1. Peningkatan Pendapatan, program pemberdayaan yang melibatkan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu pedagang meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka, serta

peningkatan kualitas dan daya saing ini dapat berdampak positif pada pendapatan pedagang.

2. Akses ke Modal dan Kredit, Perda yang mendukung akses pedagang kaki lima ke modal dan kredit dapat membantu mereka untuk mengembangkan atau memperluas usaha mereka. Dan fasilitas keuangan yang lebih mudah diakses dapat meningkatkan kemampuan pedagang dalam mengelola modal.
3. Peluang Pengembangan Usaha, Regulasi yang menciptakan peluang pengembangan usaha, seperti memberikan akses ke tempat yang strategis atau mendukung inovasi produk, dapat membantu pedagang mengeksplorasi peluang pasar baru.

Aspek Sosial:

1. Pemberdayaan Melalui Pendidikan, dimana program pendidikan yang diakomodasi dalam Perda dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagang, memberikan landasan yang lebih kuat untuk pengelolaan usaha serta pendidikan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pedagang.
2. Perlindungan Hukum dan Keamanan yaitu regulasi yang menyediakan perlindungan hukum dan keamanan bagi pedagang dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil serta rasa aman hukum dapat mendorong pedagang untuk beroperasi tanpa ketakutan akan pengusiran atau tindakan hukum yang merugikan.
3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan melibatkan pedagang dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi dapat meningkatkan perasaan memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka secara langsung. Partisipasi ini dapat menciptakan lingkungan dialog dan kerjasama antara pemerintah dan pedagang.
4. Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Lokal, dengan mendukung usaha pedagang kaki lima, terutama di sentral PKL, Perda dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan komunitas setempat. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir atau area istirahat,

juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan lingkungan sekitar.

Implementasi Perda yang menyeluruh, berbasis partisipasi, dan mendukung keberlanjutan usaha pedagang kaki lima dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi komunitas tersebut.

13. Perihal Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima. Apakah ada indikator kesejahteraan khusus yang dapat diukur sebagai hasil dari kebijakan pemberdayaan?

Terdapat sejumlah indikator kesejahteraan khusus yang dapat diukur sebagai hasil dari kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima. Berikut beberapa indikator yang relevan:

1. Pendapatan dan Laba Usaha: Peningkatan pendapatan atau laba usaha pedagang kaki lima dapat menjadi indikator langsung dari keberhasilan program pemberdayaan. Pengukuran perubahan pendapatan dapat memberikan gambaran tentang dampak positif kebijakan terhadap aspek ekonomi kesejahteraan.
2. Akses ke Fasilitas dan Infrastruktur: Peningkatan akses pedagang kaki lima ke fasilitas dan infrastruktur pendukung, seperti tempat parkir, sanitasi, atau area istirahat, dapat diukur. Ketersediaan fasilitas ini dapat mempengaruhi kesejahteraan lingkungan kerja pedagang.

3. Partisipasi dalam Program Pendidikan dan Pelatihan: Jumlah dan tingkat partisipasi pedagang kaki lima dalam program pendidikan dan pelatihan dapat dijadikan indikator keberhasilan kebijakan pemberdayaan. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan dapat berdampak positif pada daya saing dan kesejahteraan pedagang.
4. Perasaan Keamanan dan Perlindungan Hukum: Survei atau penelitian tentang perasaan keamanan dan kepercayaan pedagang kaki lima terhadap perlindungan hukum dapat memberikan gambaran tentang dampak regulasi pada aspek sosial kesejahteraan.
5. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Indikator partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan terkait regulasi dan kebijakan pemberdayaan. Tingkat keterlibatan dapat mencerminkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka.
6. Tingkat Pendidikan dan Keterampilan: Perubahan dalam tingkat pendidikan dan keterampilan pedagang kaki lima dapat dijadikan indikator kesejahteraan jangka panjang. Peningkatan dalam hal ini dapat memengaruhi daya saing dan kemampuan beradaptasi pedagang.
7. Peningkatan Lingkungan Sosial dan Komunitas: Indikator kesejahteraan sosial dapat mencakup perubahan dalam lingkungan sosial dan dukungan komunitas yang diterima oleh pedagang.

Peningkatan interaksi positif dengan sesama pedagang dan masyarakat setempat dapat memperkuat kesejahteraan sosial.

Evaluasi yang cermat dan pengumpulan data secara sistematis terkait dengan indikator-indikator ini akan membantu pemerintah dan pemangku kepentingan memahami sejauh mana kebijakan pemberdayaan berhasil meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima dan komunitas setempat.

14. Tentang Perbedaan antar Lokasi. Apakah ada perbedaan signifikan dalam implementasi Perda dan dampaknya antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan?

Tanpa informasi yang lebih spesifik, sulit untuk memberikan perbandingan langsung antara implementasi Perda dan dampaknya di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan. Perbedaan signifikan dapat terjadi berdasarkan berbagai faktor, seperti kebijakan lokal, karakteristik ekonomi, dan tingkat partisipasi komunitas.

Namun, beberapa elemen yang mungkin menyebabkan perbedaan antara dua lokasi tersebut meliputi:

1. Perbedaan dalam konteks lokal, termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, dapat memengaruhi implementasi dan dampak Perda. Misalnya, karakteristik pasar atau kebutuhan pedagang kaki lima di Gubeng mungkin berbeda dengan Gayungan.

1. Tingkat dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal di setiap lokasi dapat berbeda. Implementasi yang efektif memerlukan keterlibatan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah.
2. Tingkat partisipasi pedagang kaki lima dan komunitas setempat dapat bervariasi. Tingkat dukungan dan partisipasi aktif dapat memengaruhi sejauh mana program pemberdayaan berhasil diimplementasikan.
3. Perbedaan geografis dan infrastruktur antara Gubeng dan Gayungan dapat memengaruhi cara regulasi diimplementasikan dan dampaknya terhadap kegiatan pedagang kaki lima.
4. Kondisi ekonomi yang berbeda di dua lokasi tersebut dapat menciptakan perbedaan dalam tingkat pertumbuhan usaha pedagang dan kesejahteraan ekonomi.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, disarankan untuk merujuk pada penelitian atau laporan resmi yang mungkin telah dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait di Surabaya. Data dan informasi dari sumber-sumber resmi ini akan memberikan wawasan lebih mendalam tentang perbedaan implementasi Perda dan dampaknya di Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan.

15. Tentang Perbedaan antar Lokasi. Faktor apa yang mungkin mempengaruhi perbedaan ini?

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan dalam implementasi Perda dan dampaknya antara Sentral PKL Gubeng dan Sentral PKL Gayungan melibatkan berbagai aspek, termasuk konteks lokal, karakteristik ekonomi, dan kebijakan pemerintah daerah. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin berkontribusi:

1. Perbedaan dalam karakteristik ekonomi dan sosial antara Gubeng dan Gayungan dapat memengaruhi kebutuhan dan tantangan pedagang kaki lima. Pasar lokal, permintaan konsumen, dan kondisi lingkungan dapat bervariasi, memerlukan pendekatan yang sesuai dalam implementasi kebijakan.
2. Tingkat dukungan dan komitmen dari pemerintah lokal di masing-masing lokasi dapat memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan pemberdayaan. Ketersediaan sumber daya, alokasi anggaran, dan tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah dapat berbeda.
3. Tingkat partisipasi dan organisasi komunitas pedagang kaki lima dapat bervariasi. Tingkat keterlibatan komunitas dalam proses implementasi dan pemantauan dapat memengaruhi efektivitas kebijakan.
4. Perbedaan dalam perkembangan ekonomi dan infrastruktur di dua lokasi dapat mempengaruhi akses pedagang kaki lima terhadap sumber daya dan peluang. Infrastruktur yang baik dapat membantu atau menghambat aktivitas perdagangan.

5. Faktor-faktor geografis, seperti lokasi, aksesibilitas, dan kepadatan penduduk, dapat memainkan peran dalam implementasi kebijakan. Karakteristik geografis dapat mempengaruhi pola bisnis dan kebutuhan pedagang.
6. Aspek-aspek sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi pola konsumsi, preferensi pelanggan, dan keberlanjutan model usaha pedagang kaki lima. Program pemberdayaan yang memahami dan menghargai konteks budaya setempat mungkin lebih berhasil.
7. Faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan nasional, kondisi pasar global, atau dampak krisis ekonomi, juga dapat mempengaruhi implementasi Perda dan kesejahteraan pedagang.

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu merancang dan menyesuaikan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan khusus di setiap lokasi.

16. Mengenai Tantangan dan Hambatan. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Perda ini, baik dari perspektif pemerintah, pedagang kaki lima, atau pemangku kepentingan lainnya?

Tantangan dalam implementasi Perda terkait pemberdayaan pedagang kaki lima bisa bervariasi dan melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi dari berbagai perspektif:

Dari Perspektif Pemerintah:

1. Pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk mengimplementasikan program pemberdayaan dengan skala yang memadai.
2. Koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam implementasi Perda mungkin menjadi tantangan. Diperlukan kolaborasi yang efektif untuk memastikan kesinambungan dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Menegakkan regulasi dan hukuman terhadap pelanggaran aturan dapat menjadi sulit, terutama jika sumber daya penegakan hukum terbatas.
4. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin perlu menyesuaikan kebijakan atau regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan pedagang.

Dari Perspektif Pedagang Kaki Lima:

1. Pedagang kaki lima mungkin menghadapi ketidakpastian terkait interpretasi dan penegakan aturan, yang dapat mempengaruhi kestabilan usaha mereka.
2. Meningkatkan kualitas usaha atau mematuhi regulasi baru dapat menimbulkan beban finansial, dan beberapa pedagang mungkin mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut.
3. Pedagang dengan akses terbatas terhadap sumber daya, seperti modal, pendidikan, atau pelatihan, mungkin kesulitan memanfaatkan program pemberdayaan.

4. Pemilihan lokasi atau distribusi fasilitas pendukung mungkin tidak merata, menciptakan ketidaksetaraan di antara pedagang kaki lima.

Dari Perspektif Pemangku Kepentingan Lainnya:

1. Tantangan mungkin muncul jika program pemberdayaan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi komunitas setempat.
2. Perbedaan sosial dan budaya di antara pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan tantangan dalam komunikasi dan pemahaman.
3. Beberapa pemangku kepentingan mungkin merespons perubahan dengan resistensi, terutama jika perubahan tersebut dianggap mengganggu status quo.
4. Implikasi terhadap lingkungan dan tata ruang kota juga dapat menjadi isu yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan peraturan baru.

Mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

17. Mengenai Tantangan dan Hambatan. Bagaimana pemerintah berupaya mengatasi atau merespons tantangan tersebut?

Pemerintah biasanya mengadopsi berbagai strategi dan langkah-langkah untuk mengatasi atau merespons tantangan dalam implementasi Perda terkait

pemberdayaan pedagang kaki lima. Beberapa pendekatan umum yang mungkin diambil melibatkan:

1. Meningkatkan komunikasi dengan pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan yang diimplementasikan.
2. Mengundang partisipasi aktif dari pedagang kaki lima dan kelompok masyarakat terkait dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan untuk memastikan representasi yang lebih baik.
3. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan kepada pedagang kaki lima sehingga mereka dapat mematuhi peraturan dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas usaha mereka.
4. Memberikan dukungan finansial atau akses ke sumber daya lainnya, seperti modal usaha, kepada pedagang kaki lima untuk membantu mereka memenuhi persyaratan dan meningkatkan daya saing.
5. Menyusun kebijakan yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pedagang, termasuk melakukan revisi atau penyesuaian kebijakan jika diperlukan.
6. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan memberikan dasar untuk peningkatan berkelanjutan.

7. Meningkatkan kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat untuk meningkatkan koordinasi dalam implementasi dan penegakan regulasi.
8. Memberikan dukungan psikososial kepada pedagang kaki lima yang mungkin mengalami tekanan atau kekhawatiran terkait perubahan kebijakan untuk meminimalkan dampak negatifnya.
9. Menjaga penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan dari pedagang kaki lima.
10. Menggunakan data dan bukti untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, sehingga langkah-langkah dapat diambil berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak nyata.

Pemerintah yang proaktif dalam menghadapi tantangan ini dan terlibat dalam dialog terbuka dengan semua pemangku kepentingan cenderung dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima.

18. Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Bagaimana proses evaluasi implementasi Perda dilakukan, dan apakah ada mekanisme perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi?

Proses evaluasi implementasi Perda biasanya melibatkan beberapa langkah sistematis untuk mengukur dampak kebijakan, menilai keberhasilan implementasi,

dan mengidentifikasi area perbaikan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses evaluasi dan mekanisme perbaikan:

1. Menetapkan tujuan jelas untuk evaluasi, termasuk parameter keberhasilan yang diinginkan dari implementasi Perda. Tujuan dapat mencakup peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, peningkatan kepatuhan, atau dampak positif lainnya.
2. Mengumpulkan data yang relevan, baik melalui survei, wawancara, atau analisis statistik, untuk mengukur indikator-indikator kinerja dan dampak kebijakan. Data dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan.
3. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi Perda telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Identifikasi tren, pola, dan variabel yang dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan.
4. Menilai dampak kebijakan terhadap pedagang kaki lima, komunitas setempat, dan faktor-faktor lain yang relevan. Mengevaluasi perubahan dalam kondisi usaha, pendapatan, dan kesejahteraan pedagang.
5. Melibatkan pedagang kaki lima dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses evaluasi untuk mendapatkan pandangan langsung dari mereka. Meningkatkan validitas hasil dan memastikan representasi yang lebih baik.

6. Mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Perda dan menyoroti aspek-aspek yang berhasil dicapai. Menilai keberlanjutan program dan potensi perluasan kebijakan.
7. Berdasarkan hasil evaluasi, merancang mekanisme perbaikan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Menerapkan perbaikan kebijakan yang sesuai dengan temuan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak positif.
8. Menetapkan siklus evaluasi berkala untuk memastikan pemantauan yang berkelanjutan terhadap implementasi Perda. Evaluasi rutin membantu pemerintah untuk merespons perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi.
9. Mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pihak terkait, termasuk pedagang kaki lima, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Membangun transparansi dan meningkatkan partisipasi dalam proses evaluasi dan perbaikan.
10. Melibatkan pihak terkait dalam konsultasi dan dialog terkait hasil evaluasi serta perubahan yang akan dilakukan. Mendengarkan masukan dan pandangan dapat memperkaya pemahaman tentang dampak kebijakan.

Proses evaluasi yang baik diikuti dengan perbaikan yang tepat dapat membantu pemerintah meningkatkan keberhasilan implementasi Perda dan menjaga relevansi kebijakan terhadap kebutuhan pedagang kaki lima dan masyarakat setempat.

19. Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima?

Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima bergantung pada seberapa terbuka dan responsif pemerintah terhadap temuan evaluasi. Berikut adalah beberapa cara umum di mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan:

1. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan atau aspek kebijakan spesifik yang mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan. Langkah-langkah perbaikan ini dapat mencakup revisi regulasi, perubahan strategi pelaksanaan, atau penyesuaian program pemberdayaan.
2. Temuan evaluasi dapat membimbing penyesuaian program pemberdayaan, seperti peningkatan konten pelatihan, penargetan yang lebih ...

20. *Terkait dengan Evaluasi dan Perbaikan. Sejauh mana hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima?*

Pemanfaatan hasil evaluasi untuk meningkatkan kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima dapat bervariasi tergantung pada respons pemerintah dan keterlibatan pemangku kepentingan. Berikut adalah beberapa kemungkinan sejauh mana hasil evaluasi digunakan:

Berikut beberapa kemungkinan sejauhmana hasil evaluasi yang menunjukkan kebutuhan perubahan dalam regulasi atau kebijakan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian yang relevan. Perubahan ini dapat melibatkan revisi peraturan untuk meningkatkan kejelasan, kesesuaian, atau fleksibilitas. Jika evaluasi mengungkap kelemahan dalam program pemberdayaan, pemerintah dapat merespon dengan meningkatkan konten, metode pelaksanaan, atau cakupan program. Penyesuaian ini dapat didasarkan pada temuan evaluasi yang menunjukkan area-area yang perlu ditingkatkan.